

LAMPIRAN XXI**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM**

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Juli 2010

U. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan daerah skala kota.2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kota.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kota.2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kota.3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kota.4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kota.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kota.</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kota.</p>
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<p>1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kota.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kota.</p>
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kota. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kota.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kota. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kota. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kota.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kota. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kota.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kota.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota.
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kota. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kota.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.
	5. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota. 2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.